

**Penanggulangan Kejahatan Di Bidang Pariwisata
Pada Wilayah Hukum Direktorat Pengamanan Objek
Vital Kepolisian Daerah Jawa Timur**

***Combating Crime In The Field Of Tourism In The
Jurisdiction Of The Directorate Of Vital Object Security
The East Java Regional Police***

Dwi Rahmanto

Universitas Wijaya Putra Surabaya

Email: dwirahmanto.adt23@gmail.com

Abstrak

Pemerintah telah berupaya untuk mengembangkan sektor pariwisata melalui berbagai program, seperti pengembangan destinasi wisata prioritas, pelatihan SDM pariwisata, dan promosi pariwisata. Alokasi dana PEN untuk pariwisata dan ekonomi kreatif menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pemulihan dan pengembangan sektor ini. Pariwisata memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi nasional menuju Indonesia Maju 2024. Sektor ini memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan pemerintah dan upaya bersama, pariwisata dapat menjadi salah satu penggerak utama ekonomi nasional. Penelitian ini ingin memberikan jawaban mengenai bagaimana efektifitas serta peran Polisi Pariwisata dalam penanggulangan kejahatan di bidang pariwisata di Provinsi Jawa Timur. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Berkurangnya gangguan keamanan dalam pengamanan obyek vital pariwisata akan dapat memberikan rasa aman bagi para pelancong sehingga para wisatawan baik mancanegara maupun nusantara merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan kegiatan wisata mereka. Dalam jangka panjang standard keamanan yang tinggi di Provinsi Jawa Timur diharapkan mampu menggerakkan sektor pariwisata berkelas Dunia, menjadi tujuan utama wisata Dunia setelah Bali, dan dapat mendongkrak perekonomian Surabaya khususnya dan Jawa Timur pada umumnya. Peran Polisi Pariwisata Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Jawa Timur sangat penting dalam menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan di Provinsi Jawa Timur yang dituangkan dalam beberapa program kerjanya sehingga disimpulkan kinerjanya telah efektif, walaupun masih ada kendala seperti kekurangan personil ataupun perlu peningkatan SDM berbahasa asing.

Kata Kunci: penanggulangan kejahatan, pariwisata, pengamanan, objek vital

ABSTRACT

The government has made efforts to develop the tourism sector through various programs, such as developing priority tourist destinations, training tourism human resources, and tourism promotion. The allocation of PEN funds for tourism and the creative economy shows the government's commitment to supporting the recovery and development of this sector. Tourism has an important role in supporting the national economy towards Advanced Indonesia 2024. This sector has great potential to drive economic growth, open up jobs, and improve people's welfare. With government support and joint efforts, tourism can become one of the main drivers of the national economy. This study aims to provide answers regarding the effectiveness and role of the Tourism Police in overcoming crime in the tourism sector in East Java Province. From the results of the study, it can be concluded that reducing security disturbances in securing vital tourism objects will be able to provide a sense of security for travelers so that both foreign and domestic tourists feel safe and comfortable in carrying out their tourism activities. In the long term, high security standards in East Java Province are expected to be able to drive the world-class tourism sector, become the main destination for world tourism after Bali, and can boost the economy of Surabaya in particular and East Java in general. The role of the Tourism Police of the Directorate of Vital Object Security of the East Java Regional Police is very important in maintaining the security and comfort of tourists in East Java expected to be able to drive the world-class tourism sector, become the main destination for world tourism after Bali, and can boost the economy of Surabaya in particular and East Java in general. The role of the Tourism Police of the Directorate of Vital Object Security of the East Java Regional Police is very important in maintaining the security and comfort of tourists in East Java Province which is outlined in several of its work programs so that it is concluded that its performance has been effective, although there are still obstacles such as a lack of personnel or the need to improve foreign language human resources.

Keywords: *crime prevention, tourism, security, vital objects*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pariwisata memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi nasional menuju Indonesia Maju 2024. Sektor ini memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pariwisata merupakan salah satu sektor penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia. Target kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada tahun 2024 diproyeksikan mencapai

9,5-14,3 juta orang. Peningkatan jumlah wisatawan akan meningkatkan pendapatan devisa dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pariwisata merupakan sektor padat karya yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Pertumbuhan sektor pariwisata akan membuka lapangan kerja baru di berbagai bidang seperti perhotelan, restoran, transportasi, dan kerajinan. Hal ini akan membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pariwisata dapat mendorong pengembangan ekonomi lokal di berbagai daerah. Peningkatan kunjungan wisatawan akan meningkatkan permintaan terhadap produk dan jasa lokal, seperti makanan, kerajinan, dan jasa transportasi. Hal ini akan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah.

Pariwisata dapat menjadi media promosi budaya dan pariwisata Indonesia ke dunia. Melalui kunjungan wisatawan, budaya dan keindahan alam Indonesia dapat dikenal lebih luas. Hal ini akan meningkatkan citra Indonesia di mata dunia dan menarik lebih banyak wisatawan. Pengembangan sektor pariwisata mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih baik, seperti jalan, bandara, dan pelabuhan. Peningkatan infrastruktur akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat, tidak hanya bagi wisatawan. Pariwisata dapat mendorong sinergi antar sektor, seperti pertanian, perikanan, dan industri kreatif. Peningkatan permintaan terhadap produk dan jasa lokal akan mendorong pertumbuhan sektor lain.

Pemerintah telah berupaya untuk mengembangkan sektor pariwisata melalui berbagai program, seperti pengembangan destinasi wisata prioritas, pelatihan SDM pariwisata, dan promosi pariwisata. Alokasi dana PEN untuk pariwisata dan ekonomi kreatif menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pemulihan dan pengembangan sektor ini.

Pariwisata memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi nasional menuju Indonesia Maju 2024. Sektor ini memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan pemerintah dan

upaya bersama, pariwisata dapat menjadi salah satu penggerak utama ekonomi nasional.

Kota Surabaya Ibukota Provinsi Jawa Timur meraih peringkat kedua dari Indeks Pariwisata Indonesia yang digelar oleh Kementerian Pariwisata. Peringkat pertama diraih oleh Kota Denpasar, Bali. Sedangkan peringkat ketiga sampai ke-10 berturut-turut Kota Batam, Kabupaten Sleman, Kota Semarang, Kabupaten Badung, Kota Bandung, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bantul.

Jawa Timur merupakan propinsi dengan wilayah paling luas di Pulau Jawa. Kondisi geografisnya sangat beragam. Gunung, laut, bahkan hutan rimba dapat kita temui di Jawa Timur. Propinsi ini juga memiliki peranan yang cukup penting dalam catatan sejarah di Indonesia.

Dengan fakta itu, maka pilihan wisata yang ada di Jawa Timur pun juga sangat beragam. Wisatawan dapat memilih tempat wisata sesuai kebutuhan dan kata hati. Untuk yang suka dengan wisata sejarah, tempat-tempat seperti Situs Trowulan, Masjid Cheng Ho serta beberapa museum di Malang dan Surabaya bisa menjadi pilihan. Sedangkan untuk yang suka dengan wisata outdoor, gunung-gunung yang ada di Jawa Timur juga selalu siap untuk didaki.

Jawa Timur adalah sebuah provinsi yang terletak di sebelah timur kepulauan Jawa, Indonesia. Ibu kota Jawa Timur adalah Surabaya. Kondisi geografis daerah Jawa Timur sangat beragam sehingga kita dapat menemukan berbagai kenampakan alam di kawasan ini, seperti gunung, laut, hutan, dan masih banyak lagi.

Sebagai salah satu obyek wisata di Jawa Timur, Surabaya tidak mungkin mengalahkan kota-kota di Bali, tetapi bisa mengalahkan Bandung dan kota-kota di DIY. Hasil survei para pelancong, infrastruktur Kota Surabaya tertinggi dan terbaik, kebersihan, teratur, yang membuat Kota Surabaya menang. Kota Surabaya akan terus meningkatkan potensi pariwisata di kota pahlawan. Selama ini orang ke Surabaya hanya untuk bisnis dan tempat singgah jika mempunyai urusan dengan daerah-daerah di Jawa Timur. Alhasil, para pelancong ini hanya sekitar satu hari berada di Surabaya. Provinsi Jawa Timur

ke depan nantinya ingin wisatawan itu bisa membawa keluarganya karena ada destinasi wisata keluarga di Surabaya.

Penyusunan Indeks Pariwisata Indonesia ini mengacu pada Travel and Tourism Competitive Indeks yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia untuk mengukur kesiapan daerah wisata. Pengukuran berbasis data sekunder yang ditentukan empat aspek penopang industri pariwisata, yakni aspek lingkungan, tata kelola, potensi wisata, dan infrastruktur.

Survei persepsi menggunakan model wawancara tatap muka dilakukan terhadap 25 daerah dengan skor tertinggi. Tujuannya menyeimbangkan hasil pengukuran indeks daya saing dengan memasukkan penilaian masyarakat terkait pembangunan pariwisata di berbagai daerah.

Provinsi Jawa Timur khususnya Kota Surabaya yang selama ini dikenal belum mempunyai potensi Wisata Alam, pupus sudah pernyataan tersebut. Kawasan Bozem Wonorejo dan pantai mangrove (bakau), daerah timur Provinsi Jawa Timur adalah bukti adanya potensi Wisata Alam yang baru.

Bozem yang dibangun oleh Dinas PU dan Pematuan, selain difungsikan sebagai bendungan, dapat dimanfaatkan sebagai wisata air dan ekowisata. Ide untuk mengembangkan wisata air tersebut, sebagai upaya untuk memanfaatkan bozem atau waduk dalam skala kecil di Wonorejo, yang selama ini digunakan untuk mengendalikan banjir.

Dua bozem Wonorejo, masing-masing seluas 8.000 m², akan dilengkapi dengan sarana yang menunjang wisata air, contohnya alat pancing dan perahu. Dinas Pertanian dan Perairan Provinsi Jawa Timur juga menebar benih bandeng (nener) di bozem tersebut. Benih yang disebar ± 40.000 ekor dimaksudkan untuk mendukung wisata air, khususnya memancing di bozem tersebut. Provinsi Jawa Timur sangat mendukung tentang ide pelaksanaan untuk memanfaatkan bozem sebagai tempat Wisata Alam.

Tidak hanya bozem Wonorejo saja yang dimanfaatkan sebagai potensi Wisata Alam, Hutan Mangrove yang ada di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur pun dijadikan tempat wisata. Memang masih terdapat beberapa kendala akan dana dan pembebasan lahan, mengingat banyak lahan mangrove yang sudah banyak dimiliki oleh pengembang lain. Semoga lancar dalam pembebasan

lahan tersebut, berharap agar Provinsi Jawa Timur tidak hanya dikenal sebagai Tujuan Wisata Belanja, namun juga terkenal dengan Wisata Alam-nya.

Keberadaan Hutan Mangrove (bakau) di muara Kali Wonorejo menjadikan ekosistem di sana menjadi lebih baik, indah dan menyenangkan. Berbagai makhluk hidup, ikan dan sejenisnya akan menjadi makanan burung kuntul dan burung-burung lainnya. Diharapkan mereka berkumpul sepanjang hari dan menjadikan kawasan mangrove (bakau) itu sebagai tempat tinggalnya.

Beberapa kawasan menarik di Surabaya antara lain: Kawasan minat khusus: Ampel (wisata religi), Taman Budaya Cak Durasim, Kawasan Kota Lama Jembata Merah, Kya Kya Surabaya di kawasan Kembang Jepun, G-Walk, dan Pantai Kenjeran; Taman: Bungkul dan Bratang; Monumen dan museum: Tugu Pahlawan, Monumen Kapal Selam, Museum Mpu Tantular, Museum House of Sampoerna; Bangunan bersejarah dan cagar budaya: Grahadi, Balai Provinsi Jawa Timur, Balai Pemuda, Internatio, Jembatan Merah, Kantor Gubernur Jawa Timur, Monumen Kapal Selam, Hotel Majapahit Mandarin Oriental, Pelabuhan Kalimas, Kantor Peln, Gedung PTPN XXII, Gedung Bank Niaga, Gedung PT Artho Ageng Energi, Hotel Ibis Surabaya; Atraksi: Kebun Binatang Surabaya; Pusat perbelanjaan: Mall: Plaza Tunjungan, Surabaya Town Square, Mal Galaxy, Surabaya Plaza (Delta Plaza), Pakuwon Trade Center, Supermal Pakuwon Indah, Royal Plaza, Golden City Mall, Plaza Marina, Jembatan Merah Plaza, City of Tomorrow, Empire Palace; Modern: Sinar Supermarket 24 jam, Sinar Jemursari, Carrefour Golden City, Carrefour BG Junction, Carrefour Center Point, Carrefour Rungkut, Carrefour Ahmad Yani, Makro Tandes, Makro Waru, Giant Maspion Square, Giant Mayjend Sungkono, Giant Mulyosari, Giant Wiyung, Hi-Tech Mall (pusat komputer), Tunjungan Electronic Center, World Trade Center (pusat ponsel), Jembatan Merah Plaza (JMP) dan Pusat Grosir Surabaya (PGS); Tradisional: Pasar Atom, Pasar Turi, Darmo Trade Center (DTC), Pasar Tambah Rejo Baru, Pasar Genteng, Pasar Kapasan.

Disamping destinasi wisata regular, di Provinsi Jawa Timur telah diluncurkan destinasi wisata eksotik, Kampung Lawas Maspati, di Bubutan,

Surabaya, Jawa Timur. Peresmian tersebut sekaligus menandai penyelenggaraan Festival Kampung Lawas Maspati 2016.

Perhelatan tahunan itu diselenggarakan secara swadaya oleh warga kampung itu sendiri. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat mendukung pengembangan destinasi wisata yang berbasis masyarakat atau dikelola mandiri oleh warga. Akan terus dikembangkan dan diintegrasikan dengan destinasi wisata lain, sebagai sebuah paket kunjungan agar lebih menarik.

Diresmikannya Kampung Lawas Maspati sebagai kampung wisata menjadi tonggak kebangkitan *wong* kampung (warga kampung) untuk terus aktif berkreasi dan bertahan di era globalisasi. Bertahan dengan tidak kehilangan identitasnya sebagai orang kampung Surabaya asli atau arek Suroboyo. Dengan diadakannya Festival Kampung Lawas, maka akan mengundang masyarakat untuk berkunjung ke kampung cagar budaya yang terletak tidak jauh dari Tugu Pahlawan tersebut.

Usaha untuk memupuk kemandirian perekonomian warga kampung semakin terwujud, karena PT Pelindo III turun tangan mendukung warga melalui Program Bina Lingkungan dan Kemitraannya (PKBL). BUMN kepelabuhan yang mengelola 43 pelabuhan di tujuh provinsi di Indonesia itu, pada 2015 lalu telah membangun ruang serba guna di tengah kampung. PT Pelindo III mendirikan bangunan serba guna dengan harapan dapat menjadi tempat bagi warga untuk melakukan berbagai kegiatan, termasuk berdiskusi memajukan kampungnya. Kini harapan itu terwujud dengan diresmikannya kampung wisata.

Lembaga kepolisian dibentuk dalam suatu negara tidak terlepas dari konsep adanya upaya negara untuk mencegah ataupun menghadapi timbulnya gangguan terhadap keamanan, ketentraman serta ketertiban masyarakat. Satu hal yang pasti adalah masyarakat membutuhkan lembaga kepolisian untuk menciptakan ketertiban dan keamanan.

Sejarah perkembangan Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak kemerdekaan hingga sekarang telah beberapa kali mengalami perubahan status maupun kedudukan, dan telah beberapa kali mengalami perubahan undang-undang kepolisian, tercatat tiga undang-undang kepolisian yang

pernah berlaku antara lain Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku sejak tanggal 30 Juni 1961, tanggal 7 Oktober 1997 yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan sejak tanggal 8 Januari 2002 berlaku Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Selanjutnya disebut UU Kepolisian) yang berlaku sampai dengan sekarang¹.

Provinsi Jawa Timur sebagai etalase Indonesia dalam bidang pariwisata. Provinsi Jawa Timur dikenal sampai mancanegara, setiap tahunnya jutaan turis datang berlibur ke Provinsi Jawa Timur karena diminati banyak orang.

Banyaknya wisatawan selain mendatangkan dolar, juga tak jarang dimanfaatkan pelaku kejahatan. Tindak pidana pencurian, perampokan, pemerkosaan, dan lainnya menjadi cerita yang kerap kali dialami wisatawan. Problem keamanan dan ketertiban masyarakat sampai saat ini belum mampu terpecahkan secara baik, banyak kasus dialami turis yang dilakukan pelaku.

Seperti halnya wilayah lain, di Provinsi Jawa Timur penanggulangan kejahatan, pemeliharaan terhadap keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat menjadi tugas aparat kepolisian. Kepolisian di Provinsi Jawa Timur (Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Jawa Timur) telah memiliki tugas pokok dan fungsi. Dimana tugas pokok kepolisian antara lain:

- memelihara keamanan, ketertiban masyarakat;
- penegakan hukum;
- serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Serta fungsi kepolisian yaitu:

- pelayanan masyarakat (bantuan, pengaduan, surat-surat ijin);
- pelaksanaan intelejen bidang keamanan;
- penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- pelaksanaan Sabhara Kepolisian;
- pelaksanaan lalu lintas kepolisian;
- kepolisian perairan;
- serta pembinaan masyarakat.

Berbagai tindak kejahatan, baik yang menempatkan wisatawan asing sebagai korban atau pelaku menjadi persoalan serius yang dihadapi Provinsi

¹ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Jawa Timur sebagai daerah tujuan pariwisata dunia. Beberapa kasus kriminalitas terkait bidang pariwisata di Provinsi Jawa Timur antara lain, pencurian, curas, perkosaan dan pembunuhan, serta beberapa kasus-kasus lainnya.

Persoalan sosial seperti kemiskinan dan kriminalitas menjadi ancaman serius bagi pengembangan sektor pariwisata di Provinsi Jawa Timur. Tindak kriminalitas tersebut merupakan keprihatinan bersama sebab jika terus berlangsung akan semakin mencoreng citra pariwisata Provinsi Jawa Timur. Untuk itu, perlu ada upaya penegakan hukum yang tegas. Khusus di bidang pariwisata, Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Jawa Timur telah melakukan terobosan kreatif diantaranya membentuk Polisi Pariwisata, yang merupakan polisi khusus bertugas di bidang pariwisata.

Dalam realitanya, hubungan antara polisi, hukum dan masyarakat memang sangat erat. Hubungan antara polisi dengan efektivitas hukum: Kualitas dan keberdayaan polisi dalam menanggulangi kriminalitas, merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan afektif dan tidaknya ketentuan yang berlaku, khususnya di bidang kriminalitas yang menjadi tugas pokok kepolisian untuk menindaknya.

Berdasarkan kenyataan telah dijelaskan, penelitian ini ingin memberikan jawaban mengenai bagaimana efektifitas serta peran Polisi Pariwisata dalam penanggulangan kejahatan di bidang pariwisata di Provinsi Jawa Timur. Sehingga diharapkan adanya Polisi Pariwisata, keamanan dan ketertiban khususnya di tempat-tempat wisata di Provinsi Jawa Timur lebih dapat ditingkatkan, sehingga dapat mencegah, menanggulangi dan meminimalisir terjadinya kejahatan ataupun gangguan-gangguan baik dari dalam maupun luar negeri untuk dapat memajukan pariwisata di Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari upaya meningkatkan citra pariwisata Negara Republik Indonesia.

b. Perumusan Masalah

Bagaimana peran dan kewenangan Polisi Pariwisata dalam penanggulangan kejahatan di bidang pariwisata pada wilayah hukum Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Jawa Timur?

c. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis Normatif sehingga diharapkan dari penelitian ini dapat diperoleh kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, Berdasarkan jenis penelitian yang sudah ditentukan diatas, maka pendekatan penelitian yang akan dipakai adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep. Pendekatan ini dipilih karena penulis memfokuskan pada kajian atas norma-norma dalam sebuah undang-undang. Dalam penelitian ini, validitas data dijamin melalui triangulasi sumber. Menurut Patton (2015), triangulasi sumber, proses membandingkan data dari berbagai sumber-seperti literatur hukum, keputusan pengadilan, dan laporan lembaga antikorupsi-membantu menjamin validitas data dalam penelitian ini.²

B. PEMBAHASAN

1. Penanggulangan Kejahatan Di Bidang Pariwisata Pada Wilayah Hukum Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Jawa Timur

Menurut Soerjono Soekanto, Polisi adalah suatu kelompok sosial yang menjadi bagian masyarakat yang berfungsi sebagai penindak dan pemelihara kedamaian yang merupakan bagian dari fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).³

Berdasarkan segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan “politeia”, di Inggris “police” juga dikenal adanya istilah “constable”, di Jerman “polizei, di Amerika dikenal dengan “sheriff”, di Belanda “politie”, di Jepang dengan istilah “koban” dan “chuzaisho” walaupun sebenarnya istilah koban adalah merupakan suatu nama pos polisi pada Wilayah kota danchuzaisho adalah pos polisi pada Wilayah pedesaan. Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata “polisi” telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni “politeia”. Kata

² Satjipto Rahardjo. (2009). Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa.

³ Anton Tabah, 1991, *Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, 15.

"politeia" digunakan sebagai title buku pertama Plato, yakni "Politeia" yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi.⁴

Dasar hukum bagi polisi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 30 ayat (1),(2),(3),dan (4);
- 2) Ketetapan MPR Nomor VII/ MPR/ 2000 tentang pemisahan TNI dan kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 3) Ketetapan MPR Nomor VII/ MPR/ 2000 tentang peran TNI dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor.2 Tahun 2002 tentang Kepolisan Negara Republik Indonesia;
- 5) Peraturan Pelaksanaan Nomor.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada hakekatnya fungsi dari kepolisian dapat dipahami bahwa:

- 1) Fungsi kepolisian ada karena kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan rasa aman dan tertib dalam lingkungan hidupnya;
- 2) Masyarakat membutuhkan suatu lembaga yang mampu dan profesional untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban baginya;
- 3) Lembaga kepolisian dibentuk oleh negara yang bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban masyarakatnya dengan dibebani tugas dan wewenang serta tanggungjawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 4) Fungsi kepolisian melekat pada lembaga kepolisian atas kuasa undang-undang untuk memelihara atau menjaga keamanan dan ketertiban yang dibutuhkan masyarakat.⁵

2. Peran dan Kewenangan Polisi Pariwisata dalam Penanggulangan Kejahatan di Bidang Pariwisata pada Wilayah Hukum Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu tempat wisata terbaik kedua di Indonesia bahkan dunia. Dengan demikian sangat diperlukan dukungan dari segi keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Jawa Timur. Direktorat Pengamanan Obyek Vital

⁴ Azhari, 1995, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-unsurnya*, UIPress, Jakarta. Hlm 19.

⁵ Suyono, Yoyok Uruk, 2013, *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945*, LaksbangGrafika, Bandung. Hlm 8.

Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Jawa Timur berdasarkan Peraturan Kapolri nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010, Direktorat Pengamanan Obyek Vital bertugas menyelenggarakan kegiatan pengamanan terhadap obyek khusus yang meliputi personel dan fasilitas, materiil logistik, kegiatan di dalam fasilitas lembaga negara, perwakilan negara asing, lingkungan industri termasuk VIP dan obyek pariwisata yang memerlukan pengamanan khusus, sehingga terbentuklah TAC atau *tourist assistance center* yang merupakan bagian dari Direktorat Pengamanan Objek Vital Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Jawa Timur merupakan pusat pelayanan terhadap wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Jawa Timur baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal. Bertugas untuk memberikan pelayanan kepada wisatawan yang berwisata ke Provinsi Jawa Timur baik dalam memberi informasi seputar daerah wisata di Provinsi Jawa Timur, melapor atau untuk kepentingan lainnya dengan tujuan memberikan rasa nyaman dan aman kepada wisatawan.

Direktorat Pengamanan Objek Vital yang selanjutnya disingkat Ditpamobvit adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polres yang berada di bawah KaPolres.

Selain untuk membentuk keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan juga bertujuan untuk membina hubungan baik dengan wisatawan maupun tokoh – tokoh masyarakat setempat guna mendukung kemajuan perkembangan wisata di Provinsi Jawa Timur serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan wisatawan.

Visi dan Misi Direktorat Pengamanan Objek Vital Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Jawa Timur

1) Visi

Mewujudkan Direktorat Pengamanan Objek Vital Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai aparat penegak hukum yang berkualitas dan professional dalam menciptakan keamanan yang kondusif khususnya obyek - obyek Vital dan wisatawan yang berkunjung ke daerah Provinsi Jawa Timur dapat merasakan aman, kenyamanan dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pariwisata.

2) Misi

- a. melaksanakan pengamanan dan pelayanan secara konsisten khususnya di obyek Vital;

- b. melaksanakan pengamanan internal secara konsisten, transparan, akuntable;
- c. mewujudkan kemitraan dengan pelaku pariwisata pengelola obyek wisata untuk ikut serta dalam memberikan pelaporan kepada wisatawan dan pengamanan obyek Vital;
- d. mewujudkan keamanan yang kondusif bagi roda pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur karena sector pariwisata merupakan denyut nadi perekonomian masyarakat Provinsi Jawa Timur.

Direktorat Pengamanan Objek Vital Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Jawa Timur Berdasarkan Peraturan Kapolri nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010, Direktorat Pengamanan Objek Vital bertugas menyelenggarakan kegiatan pengamanan terhadap obyek khusus yang meliputi personel dan fasilitas, materiil logistik, kegiatan di dalam fasilitas lembaga negara, perwakilan negara asing, lingkungan industri termasuk VIP dan obyek pariwisata yang memerlukan pengamanan khusus. Direktorat Pengamanan Objek Vital (Dit Pam Obvit) merupakan unsur pelaksanaan tugas yang berada di bawah KaPolres dipimpin oleh Direktur Pengamanan Objek Vital yang bertanggung jawab kepada KaPolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali WakaPolres. Direktorat Pengamanan Objek Vital terdiri dari :

- a. Subbagian perencanaan dan administrasi (Subbag Renmin)
- b. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal)
- c. Subdirektorat Kawasan Tertentu (Subdit Waster)
- d. Subdirektorat Pariwisata (Subditwisata)
- e. Subdirektorat Lembaga Negara (Subdit Lemneg), dan
- f. Subdirektorat Perwakilan Asing (Sibdit Kilas)

Direktorat Pengamanan Objek Vital bertugas menyelenggarakan kegiatan pengamanan terhadap objek khusus yang meliputi personel dan fasilitas, materiil logistik, kegiatan di dalam fasilitas di dalam Lembaga Negara, perwakilan negara asing, lingkungan industri termasuk VIP dan objek pariwisata yang memerlukan pengamanan khusus.

Dalam melaksanakan tugas Direktorat Pengamanan Objek Vital menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : Direktur Pengamanan Objek Vital memimpin serta mengkoordinasikan dengan Wakil Direktur Pengamanan Objek Vital, Kepala Bagian Pembinaan Operasional, Kepala Subdirektorat

Kawasan Tertentu, Kepala Subdirektorat Perwakilan Asing, Kepala Subdirektorat Pariwisata, Kepala Subdirektorat Lembaga Negara dan Kepala Subbagian perencanaan dan administrasi Direktorat Pengamanan Objek Vital dalam rangka menyelenggarakan seluruh proses kegiatan pengamanan objek vital Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Jawa Timur.

Kepala Subdirektorat Pariwisata menyelenggarakan pengamanan objek wisata termasuk mobilitas wisatawan yang memerlukan pengamanan khusus dan dalam tugasnya dibantu oleh Kanit pada Subdit Wisata, Panit pada Subdit Wisata, Banum pada Subdit Wisata, Banit pada Subdit Wisata.

Direktorat Pengamanan Objek Vital Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Jawa Timur membentuk unit khusus di bawah Subdit Wisata yang bergerak langsung dilapangan atau unit yang ada di pos untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya wisatawan secara maksimal baik dalam pembuatan laporan, pemberian informasi maupun memberikan layanan kepada wisatawan mengenai keluhan mereka tentang kejahatan dan manipulasi.

Beberapa hal mengenai kewajiban anggota Polisi Pariwisata yaitu:

- 1) Mengumpulkan data dan informasi;
- 2) Memberi pengawalan atas mobilitas kunjungan wisata;
- 3) Memberi pelayanan informasi yang dibutuhkan wisatawan;
- 4) Menolong dan membantu wisatawan yang memerlukan pelayanan;
- 5) Bekerjasama dengan instansi terkait atas terpeliharanya ketertiban umum di lingkungan wisata/ tempat tinggal route perjalanan wisata.

Demikian mengenai cara bertindak Polisi Pariwisata yaitu:

- 1) Dalam memberikan penjelasan /informasi kepada wisatawan dengan bahasa yang mudah dimengerti;
- 2) Memberikan pelayanan informasi kepada wisatawan senantiasa bersikap sopan, ramah dan humanis;
- 3) Memberikan pelayanan keamanan dan ketertiban bagi wisatawan secara baik, benar, lugas dan simpatik;
- 4) Dalam memberikan pengawalan selalu bersikap etis/tidak arogan
- 5) Memberi info yang tepat mengenai daya tarik wisata;
- 6) Memberikan pelayanan pariwisata sesuai dengan standar;
- 7) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap budaya dan daya tarik wisata.

Sedangkan kegiatan Polisi Pariwisata adalah antara lain:

- 1) Memberikan petunjuk tempat/jalan yang akan dituju oleh wisatawan;
- 2) Menerima laporan pengaduan wisatawan;
- 3) Melaporkan situasi di seputar tempat bertugasnya melalui HT (*Handy Talky*) dan Miilis

3. Pengembangan Ekonomi Pariwisata Di Surabaya Dan Efektivitas Keberadaan Polisi Pariwisata

Kejahatan merupakan suatu perbuatan menyimpang dari perilaku yang dianggap sesuai dengan norma yang mengatur kehidupan masyarakat dalam berperilaku. Menurut Giriraj Shah "Crime is as old as man", menurutnya kali pertama terjadinya pelanggaran larangan dan hal itu dapat dipandang kejahatan (dosa), yakni ketika Adam memakan buah terlarang, yang berakibat dikeluarkannya Adam dan Hawa dari surga ke bumi. Dengan perkembangan manusia dan masyarakat, maka kejahatan juga tumbuh dalam berbagai bentuk dan tingkatan.⁶

Kejahatan dalam KUHP merupakan sisi lain dari pada pelanggaran. KUHP memisahkan antara kejahatan dengan pelanggaran, keduanya merupakan perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancamkan dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut) atau disebut dengan istilah perbuatan pidana ataupun delik.

Perbuatan pidana ini menurut ujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar hukum). Penanggulangan dan pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan sarana "Penal" dan "Non Penal", keduanya harus berjalan secara seimbang.⁷

Ada beberapa macam atau jenis gangguan terhadap wisatawan antara lain:

1) Gangguan langsung terhadap wisatawan

Gangguan langsung ini merupakan gangguan yang langsung ditujukan terhadap para wisatawan terdiri dari pencurian, pencopetan, penjambretan, penipuan, pemerasan, penganiayaan, pembunuhan.

⁶ Amrullah, Arief, 2006, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia, Malang. Hlm. 2.

⁷ Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. Hlm 2.

Gangguan langsung ini bisa terjadi atau dilakukan saat di tempat kedatangan, perjalanan, penginapan, tempat menikmati makanan (restoran, kafe) atau di tempat-tempat hiburan.

2) Gangguan tidak langsung

Artinya gangguan yang tidak langsung ditujukan kepada para wisatawan itu sendiri, misalnya, terjadi perkelahian masal, tawuran, terjadi kerusuhan, demonstrasi yang anarkis, SARA.

3) Gangguan kecelakaan

Gangguan ini dapat terjadi akibat kelalaian wisatawan itu sendiri atau dari para petugas pelayanan wisatawan.

4) Gangguan teroris

Gangguan teroris bukan hanya merupakan gangguan tetapi sudah merupakan ancaman, karena dapat berakibat lebih fatal.⁸

Dalam UU Kepariwisata dicantumkan secara jelas pada Pasal 20 huruf c dinyatakan bahwa setiap wisatawan berhak memperoleh perlindungan hukum dan keamanan. Ada beberapa tempat yang dianggap rawan gangguan terhadap wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara, yaitu:⁹

1) Pelabuhan dan bandara

Pelabuhan dan bandara merupakan pintu gerbang kedatangan dan pemberangkatan para wisatawan. Tempat ini sangat rawan terjadi gangguan keamanan misalnya; pencopetan, penjambretan, perampasan, pemerasan, penipuan maupun hal-hal lain yang sangat merugikan wisatawan.

2) Dalam perjalanan

Kerawanan gangguan dalam perjalanan pun masih bisa terjadi, misalnya ongkos yang telah disepakati saat sebelum berangkat akan dapat berubah (bertambah mahal) setelah pertengahan perjalanan. Demikian pula rute perjalanan yang seharusnya singkat dicarikan rute yang lebih panjang agar lebih lama dalam perjalanan dan bila menggunakan angkutan taxi, angka di argo dapat lebih besar. Jika perjalanan menuju obyek wisata bisa terjadi pencopetan, penjambretan terhadap barang atau uang dan dapat juga terjadi kecelakaan lalulintas.

3) Penginapan

Kerawanan keamanan di tempat penginapan seperti di hotel, homestay atau tempat lainnya bisa terjadi pencurian barang-barang maupun uang para wisatawan.

⁸ Dahana, Made Metu, 2012, *Perlindungan Hukum dan Keamanan terhadap Wisatawan*, Paramita, Surabaya. Hlm 15.

⁹ Kuntjaraningrat, *loc.cit.*

4) Obyek-Obyek Wisata

Setelah wisatawan tiba di obyek-obyek yang dikunjungi masih perlu diwaspadai kemungkinan akan terjadinya kerawanan-kerawanan yang perlu mendapat perlindungan. Disamping kerawanan dari kejahatan manusia, akan terjadi juga kerawanan keamanan dan kecelakaan misalnya, saat mandi di pantai, selancar, diving (menyelam) dan sebagainya.

Semakin banyaknya kunjungan wisatawan mancanega dan nusantara ke Provinsi Jawa Timur, membuktikan adanya peningkatan wisatawan baik asing maupun domestik ke Provinsi Jawa Timur. Selain memang adanya daya tarik obyek wisata yang beragam, baik wisata alam, wisata sejarah heroisme, wisata perkembangan religi, wisata beragam etnik dan kebudayaan, tentunya telah didukung dengan efektivitas yang tinggi dari keberadaan Polisi Pariwisata yang mengamankan obyek-obyek vital khususnya bidang obyek pariwisata.

Kesemua daya tarik wisata kesemuanya menjadi ciri kas Provinsi Jawa Timur secara spesifik yang perlu dikembangkan di masa mendatang, perlu didukung oleh keberadaan Polisi Pariwisata dalam mengamankan obyek vital pariwisata sehingga aman dan kondusif serta nyaman bagi kunjungan wisatawan asing maupun wisatawan nusantara, sehingga menunjang program pemerintah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Negara dari sektor pariwisata.

Pembentukan unit Polisi Pariwisata merupakan upaya kepolisian mengimbangi perkembangan dunia pariwisata. Tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah sebagai pelindung, pelayan dan penganyom masyarakat, yang menjadi dasar utama dibentuknya Polisi Pariwisata. Keamanan dan kenyamanan dalam suatu wilayah adalah hal paling utama dicari oleh para wisatawan, karena dengan kejadian terorisme beberapa tahun yang lalu di Provinsi Jawa Timur, menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi jajaran pengamanan obyek vital.

Saat ini sektor pariwisata Provinsi Jawa Timur sudah pulih dan tumbuh pesat, kunjungan wisatawan meningkat dan ekonomi semakin maju, dan tantangan ke depan adalah harus dipelihara dan tingkatkan secara bersama-sama antara Polri dan masyarakat. Data Distribusi Kedatangan Wisatawan ke

Provinsi Jawa Timur setiap bulan dari tahun ke tahun mengalami kecenderungan meningkat. Sementara itu kejadian kejahatan di bidang pariwisata atau terkait dengan wisata masih tetap terjadi yang antara lain telah ditangani oleh Dit Pamobvit.

Guna meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan yang berkaitan dengan pengamanan obyek pariwisata, maka kehadiran Polisi Pariwisata perlu ditingkatkan, sehingga lebih dapat mengantisipasi setiap gerak-gerik yang mencurigakan yang berpotensi pada tindak kejahatan. Selain itu Polisi Pariwisata perlu meningkatkan responsivitas laporan dari masyarakat adanya tindak kejahatan yang secara cepat, tepat dan akurat, sehingga potensi gangguan keamanan pariwisata segera diatasi. Dengan kedua hal tersebut diharapkan potensi gangguan keamanan dapat ditekan di masa mendatang.

Berkurangnya gangguan keamanan dalam pengamanan obyek vital pariwisata akan dapat memberikan rasa aman bagi para pelancong sehingga para wisatawan baik mancanegara maupun nusantara merasa aman ataunyaman dalam melaksanakan kegiatan wisata mereka. Dalam jangka panjang standard keamanan yang tinggi di Provinsi Jawa Timur diharapkan mampu menggerakkan sektor pariwisata berkelas Dunia, menjadi tujuan utama wisata Dunia setelah Bali, dan dapat mendongkrak perekonomian Jawa Timur pada umumnya.

Agar menciptakan keamanan dan kenyamanan wisatawan nusantara dan khususnya wisatawan asing atau mancanegara maka perlu ditingkatkan pengamanan obyek vital khususnya obyek pariwisata di Provinsi Jawa Timur, sehingga para wisatawan merasa nyaman berwisata di obyek-obyek wisata Provinsi Jawa Timur. Beberapa obyek vital yang berkaitan dengan pariwisata di Provinsi Jawa Timur yang perlu mendapatkan pengamanan diantaranya yaitu obyek-obyek langsung di lokasi tujuan pariwisata dan infrastruktur jalan yang menghubungkan ke obyek pariwisata di Provinsi Jawa Timur, infrasturktur bandara, mal-mal dan restoran, tempat-tempat penginapan seperti hotel mulai hotel melati sampai bintang lima, selain pengamanan secara umum yang menjadikan Provinsi Jawa Timur kondusif bagi kunjungan

wisatawan baik wisatawan mancanegara atau turis asing maupun wisatawan domestik atau wisatawan dalam negeri.

C. KESIMPULAN

Berkurangnya gangguan keamanan dalam pengamanan obyek vital pariwisata akan dapat memberikan rasa aman bagi para pelancong sehingga para wisatawan baik mancanegara maupun nusantara merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan kegiatan wisata mereka. Dalam jangka panjang standard keamanan yang tinggi di Provinsi Jawa Timur diharapkan mampu menggerakkan sektor pariwisata berkelas Dunia, menjadi tujuan utama wisata Dunia setelah Bali, dan dapat mendongkrak perekonomian Surabaya khususnya dan Jawa Timur pada umumnya..

DAFTAR PUSTAKA

Amrullah, Arief, 2006, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia, Malang.

Anton Tabah, 1991, *Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama.

Azhari, 1995, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-unsurnya*, UIPress, Jakarta.

Dahana, Made Metu, 2012, *Perlindungan Hukum dan Keamanan terhadap Wisatawan*, Paramita, Surabaya.

Hadi, Soetrisno, 1985, *Metodologi Reseach Jilid II*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.

Kelana, Momo. 1984, *Hukum Kepolisian*, CV. Sandaan, Jakarta.

Kuntjaraningrat, 1999, *Kebudayaan, Metalitet & Pembangunan*, Gramedia, Jakarta.

Made Metu Dahana, 2012, *Perlindungan Hukum dan Keamanan terhadap Wisatawan*, Paramita, Surabaya.

Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

Soemitro, Rony Hanitijo, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta.

Soetrisno Hadi, 1985, Metodologi Research Jilid II, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.

Suwarto, Irwan. 2003. Polri Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia, Ekasakti Press, Padang.

Suyono, Yoyok Uruk, 2013, Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945, LaksbangGrafika, Bandung.

Tabah, Anton, 1991, Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia, PT.Gramedia Pustaka Utama.